

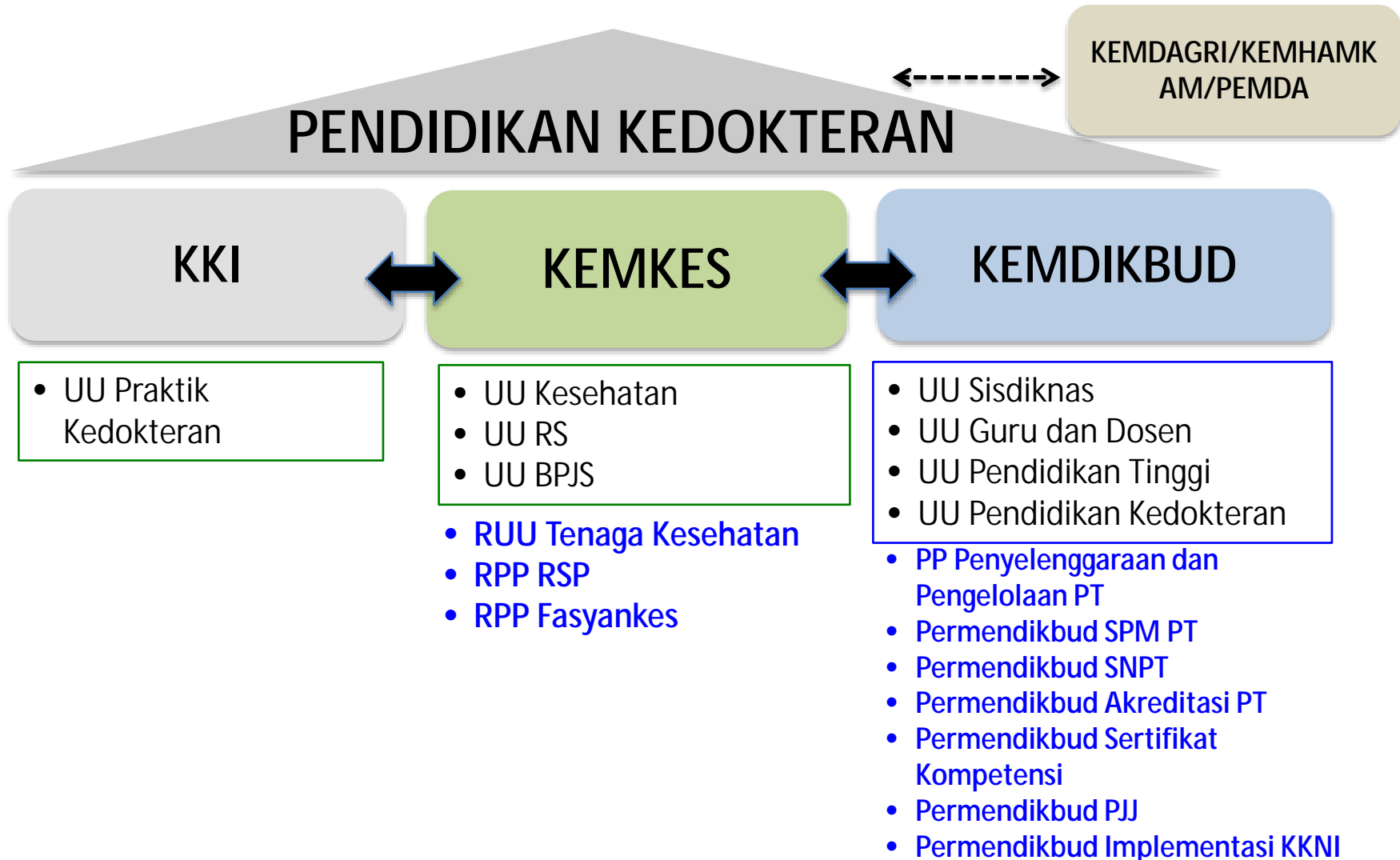


# Sinkronisasi UU Pendidikan Kedokteran dengan Berbagai Peraturan Perundangan Pendidikan Tinggi

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2013

# SINKRONISASI PENGATURAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN



- SKB Mendikbud-Menkes untuk alih bina Poltekkes
- PB Mendikbud-Menkes ttg RS PTN
- PB Mendikbud-Menkes ttg Uji kompetensi tenaga kesehatan
- Perjanjian Kerjasama KKI-Ditjen Dikti ttg Rekomendasi Pembukaan Prodi & Pembinaan FK

# Sinkronisasi Peraturan Pendidikan Kedokteran dengan Aturan Lainnya

<b>PASAL PADA UU DIKDOK</b>	<b>NORMA PENGATURAN</b>	<b>ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKDOK</b>	<b>ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA</b>
Pasal 6 ayat (6)	Syarat dan ketentuan pembentukan Fakultas Kedokteran serta penambahan program studi	PP	<ul style="list-style-type: none"><li>• PP Profesi</li><li>• Permendikbud penyelenggaraan dan pengelolaan PT</li></ul>
Pasal 7 ayat (9)	Program dokter layanan primer dan program internsip	PP	<ul style="list-style-type: none"><li>• PP Profesi</li><li>• Permenkes Internsip</li></ul>

# Sinkronisasi Peraturan Pendidikan Kedokteran dengan Aturan Lainnya

<b>PASAL PADA UU DIKDOK</b>	<b>NORMA PENGATURAN</b>	<b>ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKDOK</b>	<b>ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA</b>
<b>Pasal 8 ayat (5)</b>	Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis- subspesialis	Permendikbud	<ul style="list-style-type: none"><li>• PP Profesi</li><li>• Permendikbud penyelenggaraan dan pengelolaan PT</li></ul>
<b>Pasal 9 ayat (2)</b>	Kuota nasional mahasiswa prodi kedokteran	Permendikbud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permendikbud penerimaan, persyaratan &amp; hak mahasiswa</li><li>• Surat Edaran Dirjen Dikti ttg kuota mahasiswa kedokteran</li></ul>
<b>Pasal 17 ayat (3)</b>	Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor	Permendikbud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permendikbud penyelenggaraan dan pengelolaan PT</li></ul>

# Sinkronisasi Peraturan Pendidikan Kedokteran dengan Aturan Lainnya

PASAL PADA UU DIKDOK	NORMA PENGATURAN	ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKDOK	ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA
Pasal 19 ayat (4)	Penempatan Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis- subspesialis di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan	Permendikbud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permendikbud penerimaan, persyaratan &amp; hak mahasiswa</li><li>• Permenkes tentang program penempatan (Kemkes)</li></ul>
Pasal 21 ayat (4)	Kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran	PP	<ul style="list-style-type: none"><li>• PP Penugasan dosen &amp; pemberian insentif</li><li>• PP Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (Kemenpan)</li></ul>

# Sinkronisasi Peraturan Pendidikan Kedokteran dengan Aturan Lainnya

PASAL PADA UU DIKDOK	NORMA PENGATURAN	ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKDOK	ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA
Pasal 22 ayat (2)	Warga negara asing yang dapat menjadi Dosen atau dosen tamu	Permendikbud	Revisi permendiknas ttg izin pendidik asing pada satuan pendidikan formal
Pasal 27 ayat (6)	Seleksi penerimaan calon mahasiswa	Permendikbud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permendikbud penerimaan, persyaratan &amp; hak mahasiswa</li><li>• Surat Edaran Dirjen Dikti ttg kuota mahasiswa baru pendidikan kedokteran</li></ul>

# Sinkronisasi Peraturan Pendidikan Kedokteran dengan Aturan Lainnya

<b>PASAL PADA UU DIKDOK</b>	<b>NORMA PENGATURAN</b>	<b>ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKDOK</b>	<b>ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA</b>
<b>Pasal 29 ayat (2)</b>	Seleksi penerimaan mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis	Permendikbud	Permendikbud penerimaan, persyaratan & hak mahasiswa
<b>Pasal 30 ayat (5)</b>	Calon mahasiswa warga negara asing	Permendikbud	
<b>Pasal 31 ayat (3)</b>	Hak dan kewajiban Mahasiswa	Permendikbud	

# Sinkronisasi Peraturan Pendidikan Kedokteran dengan Aturan Lainnya

<b>PASAL PADA UU DIKDOK</b>	<b>NORMA PENGATURAN</b>	<b>ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKDOK</b>	<b>ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA</b>
Pasal 35	Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan	Permendikbud	Permendikbud beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
Pasal 36 ayat (4)	Tata cara pelaksanaan uji kompetensi	Permendikbud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permendikbud Sertifikat Kompetensi</li><li>• SE Dirjen Dikti untuk UKDI sbg exit exam</li></ul>
Pasal 45	Kerja sama FK dengan RSP dan wahana pendidikan kedokteran	PP	PP RSP (Kemkes)



# Sinkronisasi Peraturan Pendidikan Kedokteran dengan Aturan Lainnya

PASAL PADA UU DIKDOK	NORMA PENGATURAN	ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKDOK	ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA
Pasal 47	Sistem Penjaminan Mutu	Permendikbud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permendikbud SPM PT</li><li>• Permendikbud SNPT</li><li>• Permendikbud Sistem akreditasi</li></ul>
Pasal 52 ayat (3)	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran	Permendikbud	PP bentuk & mekanisme pendanaan
Pasal 58 Ayat (3)	Sanksi administratif	Permendikbud	Permendikbud penyelenggaraan dan pengelolaan PT